



JENIS INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian (Pasal 17 UU KIP)
1.	Dokumen pengadaan barang /jasa dari penyedia barang/jasa	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
2.	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin /pelanggaran etika guru, pegawai, dan siswa	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi b. Dapat menghambat proses penegakan hukum
3.	Dokumen perjanjian kerjasama	Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri/dalam negeri
4.	Biodata guru, pegawai, siswa, serta mitra kerjasama	Dapat mengungkap rahasia pribadi
5.	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
6.	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi guru dan pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan
7.	Dokumen dan berita acara pembinaan guru dan pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan
8.	Soal, jawaban, nilai ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
9.	Borang akreditasi dan data pendukung borang	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
10.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf	Dapat mengungkap rahasia pribadi
11.	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
12.	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password	Dapat membahayakan pethananan dan keamanan negara/badan publik.
13.	Data piutang, gaji dan tunjangan guru dan pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi

14.	Proposal penelitian guru	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
15.	Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
16.	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
17.	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
18.	Dokumen pengajuan ijin perkawinan/perceraian	Dapat mengungkap rahasia pribadi
19.	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan
20.	Daftar penilaian kinerja dan kompetensi	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan
21.	Arsip / surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan public
22.	Draf peraturan, keputusan, instruksi meliputi naskah akademik, naskah asli yang ditanda tangani, pertimbangan hukum, dan risalah)	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
23.	Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata uaha negara, dan agama	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik 2. Dapat menghambat proses penegakan hukum
24.	Evaluasi organisasi dan tata kerja	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
25.	Dokumen kepemilikan tanah	Dapat mengungkap rahasia Badan publik
26.	Hasil pemeriksaan keuangan reguler	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
27.	Laporan keuangan tahun berjalan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
28.	Laporan pelaksanaan anggaran	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang